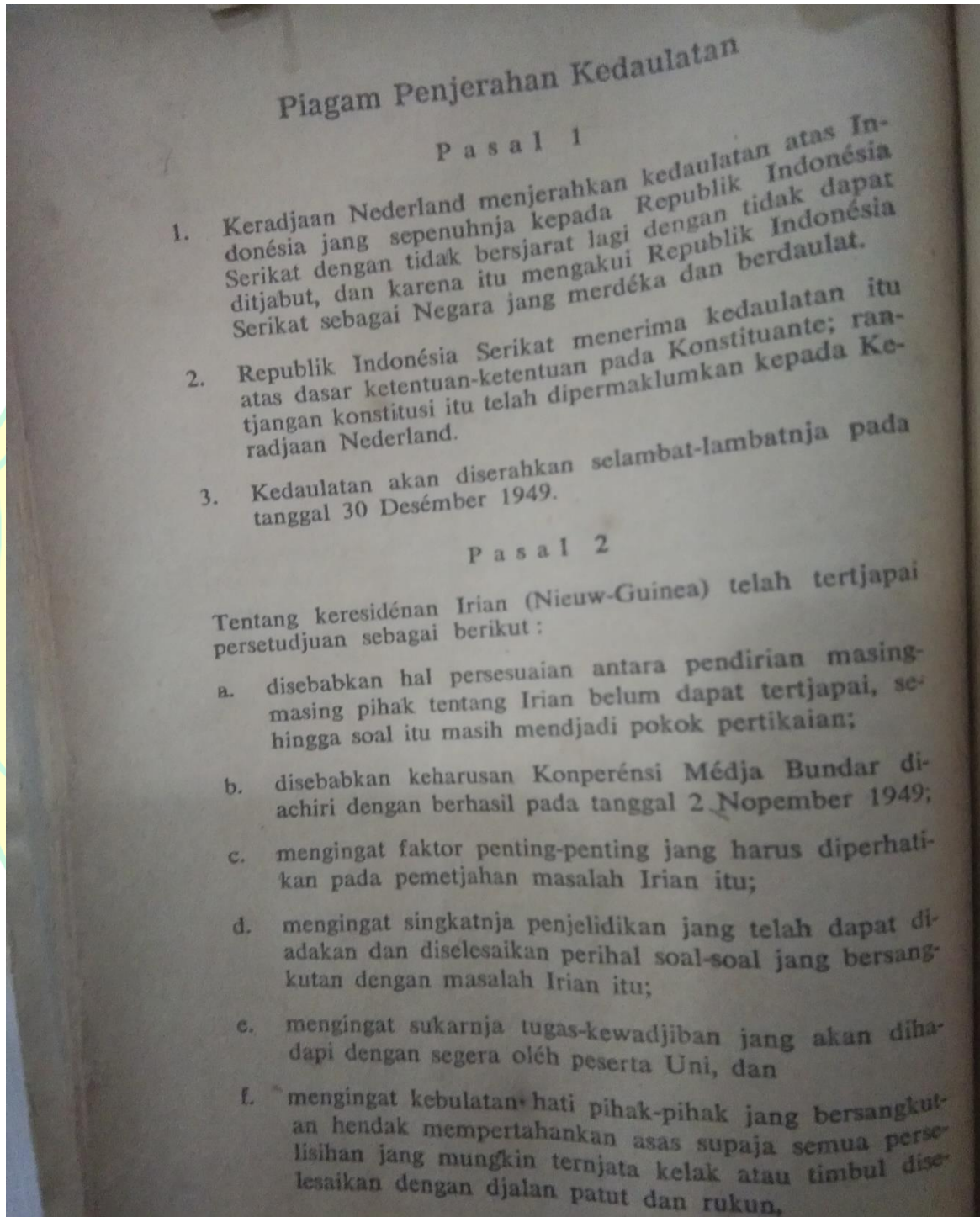


LAMPIRAN

Lampiran 1 Piagam Penyerahan Kedaulatan Konferensi Meja Bundar (KMB)



Sumber: Muhammad Yamin, Perdjuaan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi

maka status quo keresidénan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonésia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonésia Serikat dan Keradjaan Nederland.

N a s k a h III B

Charter van Souvereiniteitsoverdracht

Artikel 1

1. Het koninkrijk der Nederlanden draagt de volledige souvereiniteit over Indonesie onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesie en erkent deze mitsdien als een onafhankelijk en soevereine Staat.
2. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesie aanvaardt deze souvereiniteit op de voet van de bepalingen van haar Constitutie, welke in ontwerp ter kennis is gebracht van het Koninkrijk der Nederlanden.
3. De overdracht van de souvereiniteit zal plaats hebben uiterlijk 30 December 1949.

Artikel 2

Ten aanzien van de residentie Nieuw-Guinea is overeengekomen :

- a. gezien het feit, dat het nog niet mogelijk is gebleken de standpunten van partijen nopens Nieuw-Guinea overeen te brengen, waardoor deze in geschil blijven,
- b. gezien de wenselijkheid om de Ronde Tafel Conferentie met goed resultaat te beëindigen op 2 November 1949,
- c. gezien de belangrijke factoren, die in ogenschouw moeten worden genomen bij de oplossing van het vraagstuk Nieuw-Guinea,
- d. gezien het beperkte onderzoek, dat kon worden ingesteld en voltooid ten aanzien van de problemen, die samenhangen met het vraagstuk Nieuw-Guinea,
- e. gezien de moeilijke taak, waardoor de deelgenoten in de Unie zich al dadelijk zullen zien gesteld en,

Sumber: Muhammad Yamin, *Perjuangan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi*

Lampiran 2 Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

UNDANG-UNDANG No. 86 TAHUN 1958
TENTANG
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA
DI INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka perdjjoangan pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebidajaksanaan pembatalan K.M.B.;
- b. bahwa dalam taraf perdjjoangan pada masa ini dalam rangka - pembatalan K.M.B. dan perdjjoangan pembebasan Irian Barat tersebut diatas sudah tiba waktunja untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk didjadikan milik Negara;
- c. bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnja pada masjarakat Indonesia dan pula untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan Negara;

Mengingat : pasal-pasal 27 jo 38, 89 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA JANG BERADA DIDALAM WILAJAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada diwilajah Republik Indonesia jang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinjatakan mendjadi milik jang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Kepada pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 diatas diberi ganti-kerugian jang besarnja ditetapkan oleh sebuah Panitia jang anggota-anggotanja ditundjuk oleh Pemerintah.
- (2) Atas keputusan Panitia tersebut pada ajat 1 diatas maka baik pemilik perusahaan maupun Pemerintah dapat meminta pemeriksaan banding kepada Mahkamah Agung jang akan memberi keputusan terachir menurut atjara pemeriksaan banding dihadapnja antara pemilik perusahaan dan Negara Republik Indonesia sebagai pihak jang bersengketa.
- (3) Pembayaran ganti-kerugian seperti termaksud diatas selandjutnja akan diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pasal 3.

- (1) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam "Onteigeningsordonnantie (Stb.1920 No.574)" untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang pelaksanaan serta akibat-akibat le-

- 2 -

Pasal 4.

(1) Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas, dapat mengantjarkan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah atas pelanggaran aturan-aturannja.

(2) Segala tindak pidana seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kedjahatan.

(3) Mereka jang disangka atau didakwa melakukan kedjahatan seperti termaksud dalam ayat (1) diatas, dapat ditahan menurut tjara jang dilakukan terhadap tersangka-tersangka atau terdakwa-terdakwa jang melakukan kedjahatan jang diantjam dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau lebih.

(4) Semua peraturan tentang hukum atjara pidana mengenai penahanan sementara dilakukan terhadap mereka jang dimaksudkan dalam ayat (3) diatas.

Pasal 5.

Setiap perdjandjian atau perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas adalah batal karena hukum.

Pasal 6.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda".

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lambaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 27 Desember 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.
PERDANA MENTERI,

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,



G.A. MAENGGKOM.



DJUANDA.
MENTERI KEHAKIMAN,



G.A. MAENGGKOM.

Lampiran 3 Perintah Harian Presiden/ Panglima Tertinggi Untuk Pembebasan Irian Barat, 19 Desember 1961.

- 13 -

I ask the Secretary of the National Defence Council to bring the text of my Command here. I shall sign this Command in front of you all, may it be implemented, executed by the entire Indonesian people.

The Secretary of the National Defence Council will read out the text of my Command.

T H E P E O P L E ' S C O M M A N D

We, the President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, within the context of the policy of/have instructed the Armed Services to be ready at all times for the moment we will fix to perform the duty of liberating West Irian, Indonesia's native land, from the chains of Dutch colonialism.

And now, at this moment, because the Dutch are still intent upon continuing their colonialism in our native land, West Irian, by partitioning the people and native land of Indonesia, we order the people of Indonesia, including those in the region of West Irian, to execute the following tri-command :

1. Defeat the formation of the puppet state of Papua of Dutch colonial make.
2. Unfurl the Honoured Red and White Flag in West Irian, Indonesian native land.
3. Be ready for general mobilisation to defend the independence and unity of Country and Nation.

May God Almighty bless Indonesia's struggle for independence.

/ confrontation with the Dutch in order to liberate West Irian,

Jogjakarta, 19 December 1961.

President/Supreme Commander of the Armed Forces
of the Republic of Indonesia

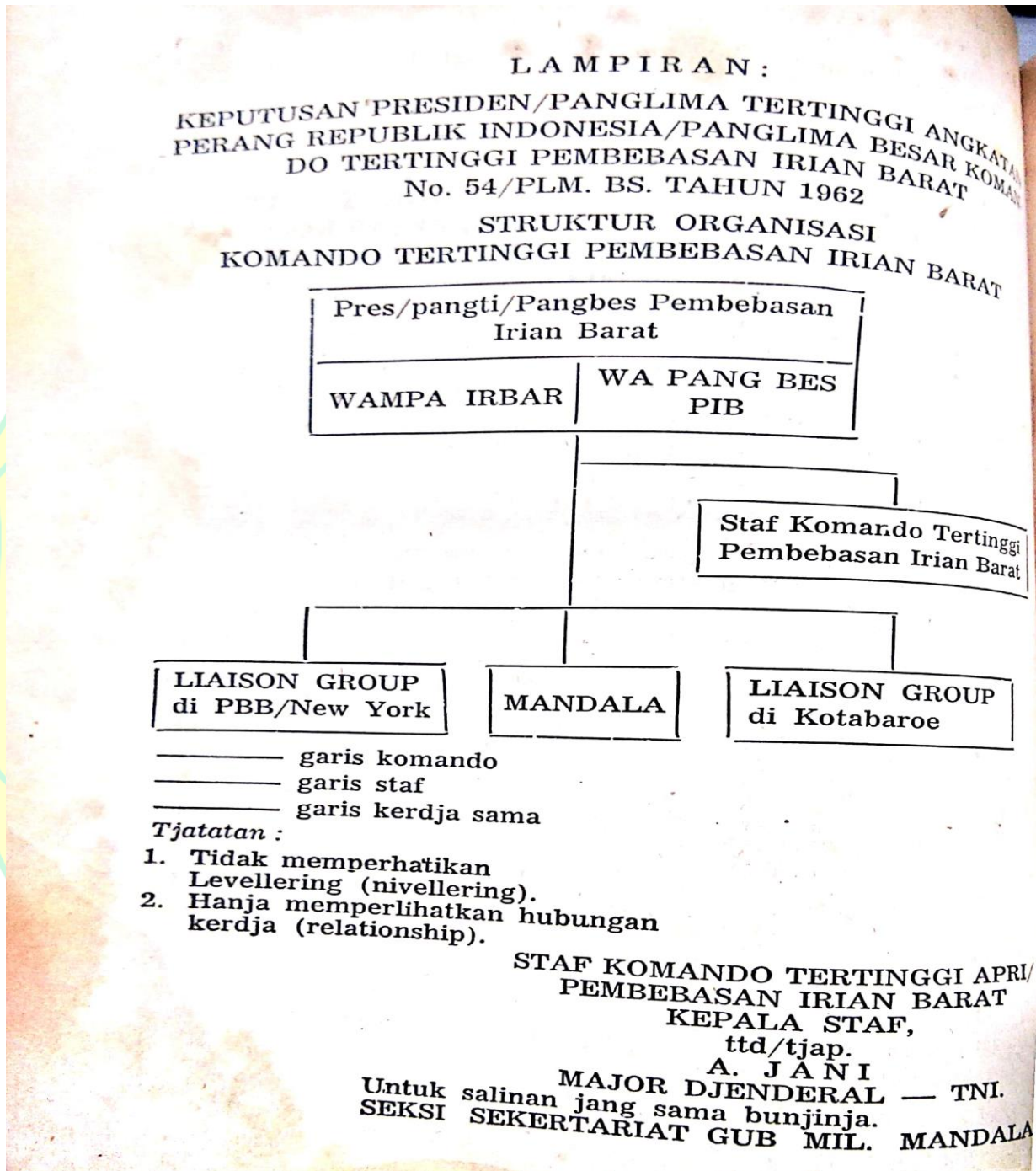
SUKARNO.

Great Leader of the Indonesian Revolution/
Commander in Chief of the Supreme Command for
the Liberation of West Irian.

(The President signed the text.)

That is my Command. Thank you.

Lampiran 4 Struktur Organisasi Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat



Sumber: Baharuddin Lopa, Djalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat

Keterangan: Berdasarkan Struktur Organisasi Koti Pemimbar, Ahmad Yani yang menjadi Kepala Staf merupakan yg bertugas membantu Presiden untuk membawahi operasi lapangan Komando Mandala yg di pimpin Soeharto

Lampiran 5 Birma Tolak Pendaratan Pesawat-Pesawat Militer Belanda

Birma Tolak Pendaratan Pesawat² Militer Belanda

Djakarta, 7-6 (Ant).

PEMERINTAH Birma — menurut keterangan² jang di peroleh „Antara” telah mengam bil sikap tegas, jaitu menolak izin pendaratan dari 2 buah pesawat militer Belanda jang akan menudju Irian Barat.

Menurut sumber „Antara” penolakan izin mendarat 2 pesawat militer Belanda oleh Pemerintah Birma itu, terdjadi pada achir bulan Mei jbl, ketika dinegara itu akan mendarat 2 buahpesawat mi liler Belanda jang bermak- sud menudju ke Irian Barat.

Sikap tegas Pemerintah Birma itu, menurut ketera- ngan, diambil sesudah adanja kenjataan² tentang kegiat- an² Belanda dengan mengi- rimkan kesatuan² bersendja tanja dalam djumlah besar kedaerah Irian Barat, jang dianggap bisa menimbulkan bentrokan sendjata serta me- rupakan antjaman bagi kea- manan dan perdamaian diba- gian Asia ini.

dinegara Eropa, Timur Teng ah, Afrika, Latin Amerika dan Djepang.

Demikian Penerangan AD.

DB Australia Temui Sek- djen Deperlu

Dutabesar Australia Pa- trick Shaw dan Sekdjen De partemen Luar Negeri Suwi to Kusumowidagdo hari Sab tu mengadakan pembitjara- an selama setengah djam di kamar kerdja Sekdjen di Pe djambon.

Tidak diperoleh keterang- an resmi mengenai pembitja- raan tsb, tetapi dapat didu- ga, bahwa pembitjaraan itu menjangkut masalah Irian Barat jang kini mendjadi a- kut dengan tindakan Belanda jang mengirimkan kapal pe- rang „Karel Doorman” dan kekuatan tentara 3 bataljon kedaerah Irian Barat. Menu- rut berita² pers, „Karel Doorman” akan singgah di- pelabuhan² Australia, antara lain Freeman²le.

Lampiran 6 Jepang Menolak Kapal Karel Doorman

SENIN 29 AGUSTUS 1960

Induk Karangan

Sikap Djepang Jang Sangat Tertjela

ADANJA Direktur Biro Asia dan Pasifik Suska di Djepang untuk mendesak supaya Menlu Djepang Zentaro Kosaka menarik kembali keputusannya, mengizinkan „Karel Doorman” mengundjungi Djepang bulan September jad. ini, menundjukkan betapa seriusnja situasi jang timbul sekarang ini dalam rangka perhubungan antara Indonesia dengan Djepang. Kepada Menlu Djepang Z. Kosaka oleh Suska telah disampaikan surat Menlu Dr. Subandrio jang mendesak tidak dilandjutkannya kundjungan „Karel Doorman” ke Djepang. Suska dan Duta Besar Bambang Sugeng telah mengatakan kepada Menlu Djepang betapa „gentingnja situasi” sebagaimana ditjerminkan oleh protes Indonesia Sementara itu dari berita2 jang diterima dari Tokyo diketahui, bahwa rakjat Djepang dengan tandas menuntut kepada pemerintahnja supaya izin kundjungan kapal perang induk Belanda „Karel Doorman” itu dibatalkan sadja. Komite Setjakawan Rakjat Asia-Afrika Djepang, Komite Perdamaian Djepang dan Dewan Djepang Melarang sendjata2 Nuclear telah mengirimkan suatu pernyataan kepada pemerintah Djepang, dimana dinjatakan protes mereka terhadap akan tibanja „Karel Doorman” ke Djepang. Djuga mungkin sekali bahwa anggota2 Zengakuren akan mengadakan suatu demonstrasi simbolis didepan kedutaan besar Belanda untuk menundjukkan sikap persahabatan mahasiswa2 Zengakuren terhadap Indonesia.

SEMENTARA itu PP SBKA atas nama 80 ribu anggotanja didalam kawatnja jang dikirimkannya kepada Duta Besar Djepang di Djakarta dan Menlu RI Dr. Subandrio jang isinja menjatakan, bahwa keputusan pemerintah Djepang menerima kapal induk Belanda itu telah membangkitkan kemarahan dan anti-fasis dan sangat mentjela serta memprotes keras keputusan pemerintah Djepang tersebut. Sedjalan dengan reaksi2 dipihak rakjat Indonesia ini mengenai diberikannya izin oleh pihak Djepang atas kundjungan „Karel Doorman” ke Djepang, baiklah diperhatikan djuga bahwa Ketua Organisasi Indonesia Setiakawan Rakjat Asia — Afrika H. Anwar Tjokroaminoto menjatakan, rakjat Indonesia tidak boleh diam mengenai peristiwa „Karel Doorman” dan kalau perlu menarik kembali Duta Besar RI di Djepang. Ia menganjurkan agar semua negara2 Asia-Afrika jang bersahabat dengan Indonesia djuga berbuat demikian. Dalam hubungan ini patutlah pula diperhatikan pernyataan Wakil-Sekdjen Front Nasional Pembebasan Irian Barat, Ketua Seksi DPR-GR, DPP Pemuda Demokrat Indonesia, jang kesemuanja memprotes dan sangat mentjela atas sikap pemerintah Djepang jang memberikan izin atas kundjungan „Karel Doorman” ke Djepang.

Sumber: Merdeka, 29 Januari 1960

Lampiran 7 Rapat Rutin Staf Operasi Pembebasan Irian Barat Yang Diketuai Oleh Ahmad Yani

Rapat Rutine Staf Operasi Pembebasan Irian Barat

Djakarta 3 Djanuari (PIA)

Staf Operasi Pembebasan Irian Barat hari Rebo pagi selama kurang lebih sedjam sekali lagi mengadakan suatu rapat di Istana Merdeka dipimpin sendiri oleh presiden Soekarno selaku panglima besar komando pembebasan Irian Barat.

Major djenderal Achmad Yani ketua staf itu ketika melihat para wartawan dengan senyum lebar sebelum ditanja sudah menjawab: „Tidak ada keterangan hanja rutine biasa sadja”.

Satu2nja keterangan jang dibe rikan oleh djenderal itu adalah Operasi jang dibentuk di Istana bahwa keputusan mengenai Staf Merdeka tanggal 26 Desember jl itu akan diumumkan harini. Tetapi karena naskah keputusan itu untuk keperluan pers masih harus diperbanyak maka pada hari Kamis besok baru akan dapat disiarkan.

Rapat Staf Operasi itu selain major djenderal Achmad Yani di hadiri lengkap para anggautanja yakni komodore udara Wirjoseputro, kolonell (Pel) Soebono serta komisaris besar (Brigmob) Sutjip to, dan hadir pula sekretaris umum Dewan Pertahanan Nasio

Lampiran 8 Komando Mandala Bersifat Gabungan

Komando Mandala Bersifat Gabungan

DJAKARTA, 4 Djanuari (PIA).

PRESIDEN Soekarno dengan surat keputusan nr. 1/1962 pada pagi Kamis telah menetapkan pembentukan Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat.

Berdasarkan surat keputusan tersebut "Komando Mandala" tersebut bersifat gabungan (unified command) dan meliputi wilayah Indonesia bagian Timur.

Tugasnya yang utama ialah dalam rangka pelaksanaan Tri Komando Rakjat dan perintah Panglima Besar Komando Tertinggi pembebasan Irian Barat, "menjelenggarakan pada waktunya operasi militer dalam perjuangan merebut wilayah Irian Barat yang

diduduki oleh Belanda".

Memimpin dan mempergunakan baik segala pasukan bersenjata maupun segala macam barisan perlawanan rakjat dan lain2 unsur potensi nasional yang berada dalam lingkungan kekuasaannya untuk pembebasan wilayah Irian Barat.

Dalam menunaikan tugasnya untuk kepentingan kesatuan tindakan dalam daerah operasi Irian Barat Komando Mandala didampingi oleh staf pemerintahan daerah Propinsi Irian Barat bentuk baru.

Susunan Komando Mandala ini akan ditentukan dengan surat keputusan tersendiri.

Penetapan pembentukan Komando Mandala itu dilakukan oleh Presiden Soekarno pagi hari Kamis dalam rapatnya dengan Staf Operasi pembebasan Irian Barat di Istana Merdeka. Rapat tersebut berlangsung selama sedjam, yaitu sebelum Presiden Sukarno bertolak ke Makasar untuk perjalanannya 4 hari di daerah Sulawesi Selatan.

Rapat Kepala Negara dengan Staf Operasi itu dihadiri pula oleh sekretaris Depertan, menteri transkopemada Achmadi. Menteri luar negeri yang senantiasa juga hadir, kali ini berhalangan karena sakit.

Sumber: Merdeka, 9 januari 1962

Lampiran 9 Ahmad Yani Menyatakan Panglima Mandala Didampingi Dua Orang Wakil dan Markas Besarnya Ditetapkan Di Makasar

PANGLIMA DIDAMPINGI 2 ORANG WAKIL MARKAS BESARNYA DITETAPKAN DI MAKASAR

DJAKARTA, 10 Djan. (Mdk).

PRESIDEN/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat Soekarno dalam rapatnja dengan "Staf Operasi" Komando Pembebasan Irian Barat kemarin pagi di Istana Merdeka telah menetapkan Brigadir Djenderal Suharto sebagai "Panglima Mandala" untuk Pembebasan Irian Barat. Demikian dinjatakan oleh Kepala Staf Operasi Komando Pembebasan Irian Barat Major Djenderal Achmad Jani setelah selesai rapat pada djam 10.50 hari Selasa kemarin.

Selanjutnja dinjatakan oleh Major Djenderal Achmad Jani bahwa Rapat Staf Operasi yang diadakan dari djam 10.00 kemarin pagi di Istana Merdeka telah menetapkan bahwa "Panglima Mandala" Brigadir Djenderal Suharto dalam mendjalankan tugasnja akan didampingi oleh 2 orang wakil yang terdiri dari seorang perwira Angkatan Laut dan seorang perwira Angkatan Udara, jg nama2nja masih akan diumumkan kemudian.

Oleh Major Djenderal Achmad Jani selanjutnja dinjatakan bahwa rapat "Staf Operasi" Komando Pembebasan Irian Barat telah menetapkan Markas Besar "Panglima Mandala" berkedudukan dikota Makasar.

Dr. Soebandrio sebagai anggota Staf Operasi Komando Pembebasan Irian Barat setelah rapat itu selesai kemudian djuga menambahkan, bahwa dalam rapat Staf Operasi itu telah diambil kesimpulan oleh Presiden Panglima Besar bahwa hingga kini belum ada tanda2 njata bhw seluruh politik diplomatik dapat membantu penyelesaian masalah Irian Barat. Oleh Menteri Luar negeri Dr. Subandrio dinjatakan, bahwa hal ini disebabkan sikap Belanda sendiri yang hingga kini masih sangat samar2.

Bagi kita, kata Dr. Subandrio selanjutnja, dalam waktu seminggu sampai 10 hari, kita harus dapat menasabli keputusan atau ketentuan apakah diploma

si dengan Belanda dapat djuga membantu penyelesaian masalah Irian Barat.

Rapat "Staf Operasi" Komando Pembebasan Irian Barat jg berlangsung hampir dua djam di Istana Merdeka kemarin itu lengkap dihadiri oleh anggota2nja, yang terdiri dari Kepala Staf Major Djenderal Achmad Jani, Komodore Udara Wirjoseputro, Menlu Dr. Subandrio, Menteri Kol. Achmadi, Kol. Subono, Komisaris Besar Brimob Soetjipto, dan sekretaris Let. Kol. Sabur.

PRESIDEN DAN DUBES JONES



BRIGDIEN SUHARTO

Sumber: Merdeka, 10 Januari 1962

Lampiran 10 Tindakan Militer Bisa Terjadi Setiap Waktu

Setiap Waktu Bisa Terjadi Tindakan Militer

Perintah Nasional, maka duasetengah jam. Da 'deral-

IT
1w
62
ke
P
lam

Perkarang Tergantung Pada Dunia Luar Bisa-
nja Ditjapai Penjelesaian Setjara Damai
Dalam Masalah Irian Barat

DJAKARTA, 14 Djanuari (PIA).—
KEPALA Staf Operasi Irian Barat Major Djenderal Ach-
mad Jani menerangkan bahwa setiap hari bisa terjadi
tindakan militer. "Sekarang tergantung dari dunia luar
penyelesaian setjara damai dalam
masalah Irian Barat."

Major djenderal Jani selanjut
nia menerangkan, bahwa sampai
sekarang belum ada perkembangan
baru dim bidang diplomasi utk me-
njelesaikan masalah Irian Barat
itu.

Atas pertanyaan tentang batas
waktu 10 hari seperti yang dije-
laskan oleh dr. Soebandjo ten-
tang mungkin-tidaknja ditempuh
djalan diplomasi untuk menjelesa-
kan senketa Irian Barat, major
djenderal Jani mengatakan, bah-
wa kemungkinan itu tidak tergan-
tung pada 10 hari itu saja, me-
ainkan setiap hari bisa terjadi
tindakan militer. "Sekarang ter-
gantung pada dunia luar apakah
bisa tertjapai penjelesaian setjara
damai dalam masalah Irian Barat
itu", demikian major djenderal
Jani.

Memberikan komentar tentang
perunding Belanda untuk mengirim
kan kapal induk "Karel Door-
man" ke Irian Barat, major Djen-
dral Jani mengatakan, bahwa
dikajau Belanda, mengirimkan

kapal itu, maka ini merupakan
salah satu tindakan yang paling
bodoh, karena hanya akan lebih
memperdagang lagi masalah Irian
Barat.

Dan kita akan lebih menginten-
sivir lagi persiapan2 dibidang mi-
liter, demikian major djenderal
Jani.

Sementara itu sekretaris Staf
Operasi, let. kol. Sahur mengu-
mumkan, bahwa kenaikan pangkat
brigjen Soebarto mendjadi ma-
jor djenderal itu, didasarkan
atas keputusan presiden no. 72-
1962.

Penaikan pangkat itu didasarkan
atas pertimbangan pentingnya tu-
gasnja dalam rangka perjuangan
Irian Barat.

BANTUAN DARI LUAR TAK TERGANTUNG PADA KITA

Major djenderal Achmad Jani
mengatakan, bahwa bantuan dari
Uni Sovjet atau negara sosialis
lainnja kepada Indonesia dijika

Australia menjampuri perseng-
kejaan antara Indonesia dengan
Belanda mengenai Irian Barat
tidak tergantung pada kita.

Major djenderal Jani memberi
kan keterangan ini ketika hari
Sabtu selesai sidang gabungan De-
wan Pertahanan Nasional, Staf
Operasi Komando Pembebasan
Irian Barat dan Gabungan Kepala2
Staf di Istana Bogor oleh seorang
wartawan asing diadjudkan perta-
niaan apakah Indonesia akan me-
minta bantuan dari Uni Sovjet
atau negara sosialis lainnya djika
Australia akan menjampuri perseng-
kejaan Irian Barat.

Atas suatu pertanyaan selanjut-
nja apakah di Indonesia bagian
Timur kini sudah diadadakan per-
siapan2 militer dalam rangka
pembebasan Irian Barat kepala
staf itu menerangkan, bahwa per-
siapan2 sematjam itu bukanlah di-
adakan hanya didaerah itu saja,
tetapi diseluruh Indonesia.

Major djenderal Jani mengata-
kan lebih djauh, bahwa memang
sedjak dahulu hingga sekarang
terdapat kelompok2 yang mema-
suki daerah dataran Irian Barat.

Mereka adalah merupakan pe-
muda2 kelahiran Irian Barat dan
kembali ke daerah asalnja itu,
demikian dilandjutkan tidak akan
kita halangi. Karena selain mere-
ka merupakan bangsa Indonesia
maka memasuki pula daerah in-
donesia yg kini masih diduduki oleh
Belanda.

Dan memang, demikian atas
pertanyaan lebih djauh diterang-
kan, mereka kembali ke Irian
Barat dengan membawa berbagai
matjam sendjata, karena mereka
pun dalam rangka revolusi kita
hendak memberikan sumbangan
nja.

Sendjata2 yang ada pada mereka
sedjak dahulu memang sudah di-
miliki, karena dsamping angka-
tan bersendjata dan bekas kaum
pemberontak, sebagai akibat
(result) dari revolusi bersendjata,
masih banyak terdapat sendjata2
di luar. Demikian major djenderal
Achmad Jani yang akhirnya sekali
lagi menambahkan, bahwa pemu-
da2 itu dengan hasrat mereka
membebaskan Irian Barat hanya
ingin memberikan sumbangannya
kepada revolusi kita.

B.M. Diah Duta Besar Untuk Inggeris Raya

Djakarta, 15 Djan. (Mdk)

DJUBIR Departemen Luar negeri Irian Soeriyanagera
telah mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth II dari Ingge-
ris Raya pada tanggal 13 Djanuari 1952 telah memberikan
ersetudjuannya atas pengangkatan B.M. Diah, kini duta-
besar Indonesia di Praha, sebagai dutabesar luarbiasa
an berkuasa penuh pada Istana St. James.

Dalam waktu singkat ini Du-
tasar B.M. Diah akan tiba
di Jakarta untuk konsultasi. De-
lan pengumuman tersebut,



Sumber: Merdeka, 15 Januari 1962

Lampiran 11 Sikap Inggris Tentang Penangguhan Pengiriman Senjata Tidak Pengaruhi Pembebasan Irian Barat

Sikap Inggeris Tak Pengaruhi Pembebasan IB

Kalau Perlu Kita dapat Beli Sendjata Dari Negeri Lain, Kata Djen Jani

BOGOR, 27 Djanuari (PIA).

KEPALA Staf Operasi Pembebasan Irian Barat Major Djenderal A. Jani hari Sabtu ini mengatakan bahwa penangguhan sementara pengiriman sendjata² dari Inggeris tidak akan mempengaruhi perjuangan kita untuk membebaskan Irian Barat.

Tapi sampai sebegitu jauh kita belum menerima keterangan resmi mengenai penangguhan pengiriman sendjata² itu, demikian Major Djenderal Jani yang memberikan keterangannya itu selesai rapat Staf Operasi Pembebasan Irian Barat di Istana Bogor.

Kata Major Djenderal Jani lebih lanjut, „dari Inggeris kita tidak membeli sendjata melainkan hanya alat² untuk sendjata² yang sudah ada”.

Djika perlu maka terdesak oleh keadaan kita akan membeli sendjata dan peralatan dari negara² lain, demikian Major Djenderal Jani menambahkan.

Sewaktu ditanya sendjata² apa yang hendak dibeli oleh Indonesia, kepala Staf Operasi Pembebasan Irian Barat itu mengatakan, bahwa sendjata² yang dimaksudkan itu ialah sendjata yang belum kita hasilkan sendiri

(sendjata² ringan).

Diminta komentarnya mengenai berita² yang menyatakan bahwa pantai barat Irian Barat telah dikuasai oleh kesatuan² gerilja, Major Djenderal Jani mengatakan, bahwa hal itu mungkin benar.

Dalam rapat Staf Operasi itu presiden Soekarno telah mengadakan peninjauan setjara keseluruhan perjuangan kita untuk membebaskan Irian Barat.

KETERANGAN MENLU

Menteri luar negeri dr Su bandrio yang telah menghadiri rapat Staf Operasi Pembebasan Irian Barat itu sebagai anggotanya, menjawab pertanyaan apakah telah ditjapai kemajuan usaha untuk menyelesaikan Irian Barat dengan Belanda mengatakan, bahwa tidak ada sesuatu yang positif yang telah ditjapai.

Lampiran 12 Riwayat Hidup dan Karir Ketentaraan Ahmad Yani

RIWAJAT HIDUP LETNAN DJENDERAL AHMAD YANI MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT

- Tempat dan tanggal lahir : Djelar (Purworedjo) Djawa Tengah 19 Djuni 1922
- Pendidikan Umum : a. MULO-B
b. AMS-B
- Pendidikan/Latihan Militer : September 1941 — Training pada Dinas Geodetis Tentara (Pusat Pemetaan Tentara) di Malang Djawa Timur.
- Februari 1942 — N.C.O. Training untuk Korps Tjadangan Tentara (Leerling Kader Miliciens) di Bogor. Djawa Barat.
- Agustus 1943 — N.C.O. Training pada Sekolah Latihan Militer Magelang, Djawa Tengah.
- Oktober 1943 — Latihan Perwira untuk Pasukan Pertahanan Dalam Negeri di Bogor, Djawa Barat
- 1955 — Sekolah Komando dan Staf Umum Militer di Ft. Leavenworth, Kan. A.S.
- 1956 — Kursus Perang Darat—Udara di Old Sarum Inggris.
- Karir Militer : a. 1943—1945 — Pemimpin Peleton dengan pangkat Letnan.
- b. 1945 — Komandan Kompi dengan Pangkat Kapten.
- c. 1946—1948 — Komandan Bataljon dari Bataljon 3. Resimen 19. Divisi V.
- d. 1948—1949 — Perwira Pimpinan Brigade Dua.

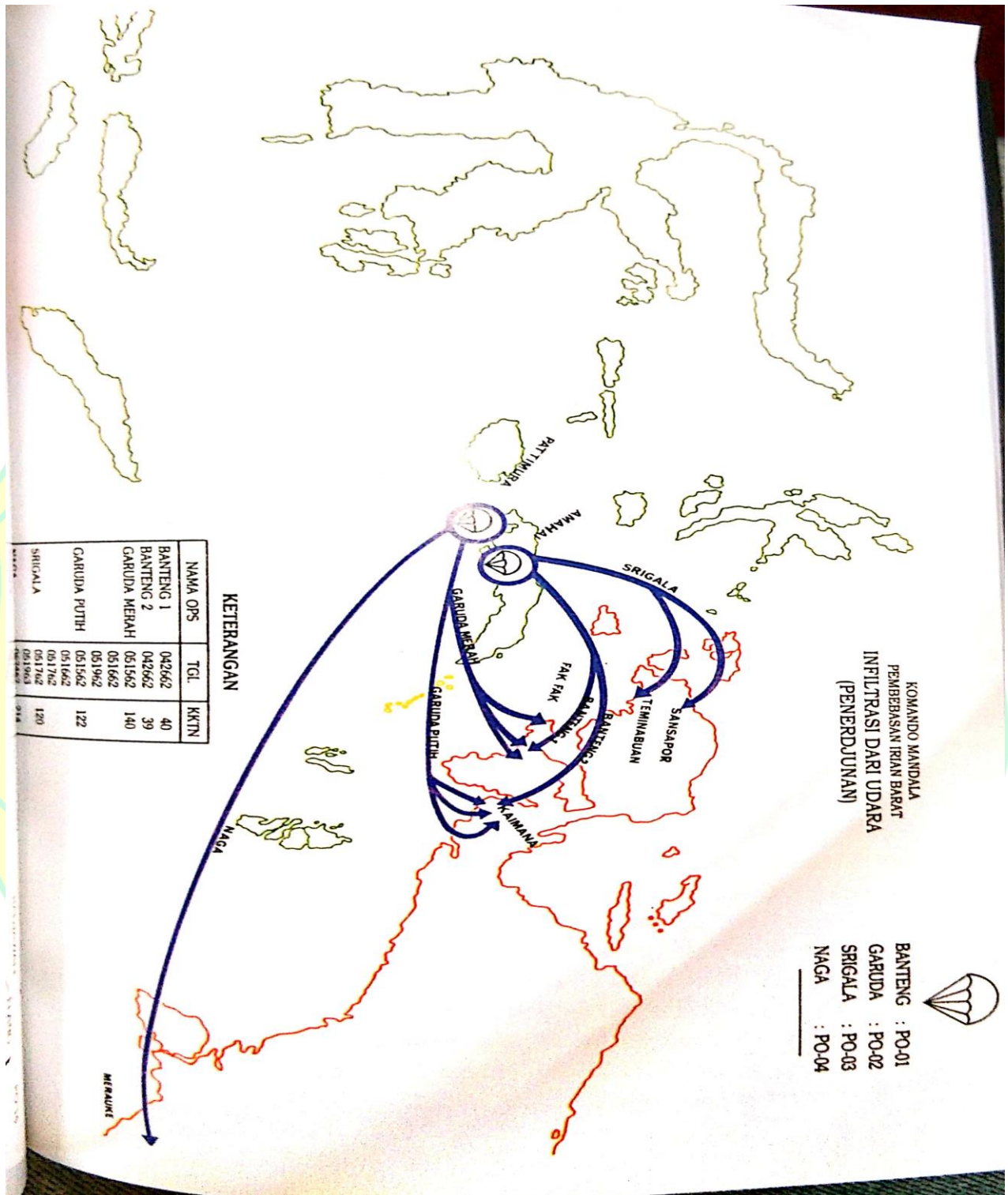
- e. 1949 — Dinaikkan Pangkatnja mendjadi Letnan Kolonel.
- f. 1949—1950 — Memimpin Brigade 9/III
- g. 1951—1955 — Memimpin Brigade "N"
- h. 1955 — Memimpin Resimen Infantri 12.
- i. 1955 — Setelah menjelesaikan training pada Sekolah Komando dan Staf Umum Militer, di tugaskan pada Devisi I Angkatan Darat Amerika Serikat dalam suatu job-training
- j. 1956 — Diangkat mendjadi Asisten Kepala Staf Angkatan Darat bagian Operasi dan Training. Naik pangkat mendjadi Kolonel.
- k. 1958 — Diangkat mendjadi Deputy II Kepala Staf Angkatan Darat. Ditugaskan untuk memimpin "Operasi 17 Agustus" guna menumpas pemberontakan (PRRI) Di Sumatra Barat.
- l. 1958 — Diangkat sebagai Deputy Kepala Staf Angkatan Darat disamping fungsinja sebagai Deputy - II.
- m. 1960 — Dinaikkan pangkat mendjadi Brigadir Djenderal. Memimpin Misi Meliter ke A.S.
- n. 1961 — Pada tanggal 1 Djanuari naik pangkat, Major Djenderal
- o. 1961 — Memimpin Misi Pembelian Sendjata ke Yugoslavia.

- p. 1962 — Pada tanggal 2 Djanuar i diangkat mendjadi Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat
- q. 1962 — Diangkat mendjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat.
- r. 1964 — Dinaikkan Pangkatnja mendjadi Letnan Jenderal pada tanggal 1 Djanuari.

Tanda² Kehormatan dan Dekorasi

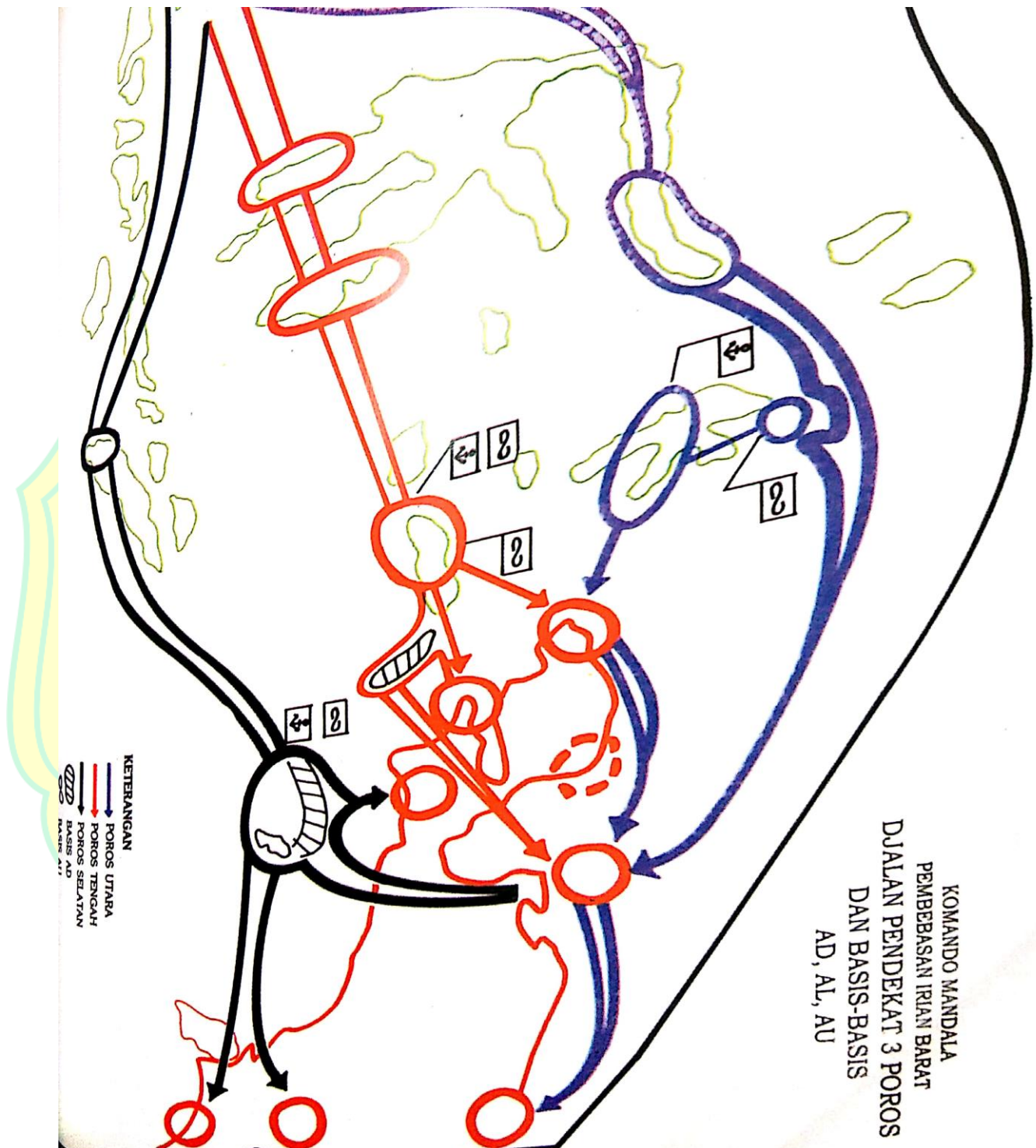
1. "BINTANG R.I. - III"
Bintang klas 3 Republik Indonesia.
2. "BINTANG SAKTI"
Bintang luarbiasa kepahlawanan
3. "BINTANG GERILJA"
4. "BINTANG SEWINDU ANGGATAN PERANG"
Bintang untuk dinas aktif sedjak 5 Oktober 1945 sampai 5 Oktober 1953.
5. "SATYALANTJANA KESETIAAN 16 TAHUN"
Medali kesetiaan selama 16 tahun dinas.
6. "SATYALANTJANA PERANG KEMERDEKAAN KE-I"
Medali untuk djasa atas keberanian selama Perang Kemerdekaan Pertama.
7. "SATYALANTJANA PERANG KEMERDEKAAN KE - II"
Medali untuk djasa atas keberanian selama Perang Kemerdekaan Kedua.
8. "SATYALANTJANA GERAKAN OPERASI MILITER I"
Medali untuk djasa atas keberanian selama Gerakan Militer Pertama (terhadap Pemberontakan Komunis).
9. "SATYALANTJANA GERAKAN OPERASI MILITER VI"
Medali untuk djasa atas keberanian selama Operasi Militer ke-6 (terhadap Pemberontakan Darul Islam di Dja-
wa Tengah).

Lampiran 13 Peta Infiltrasi Penerjunan Dari Udara Komando Mandala Pembebasan Irian Barat



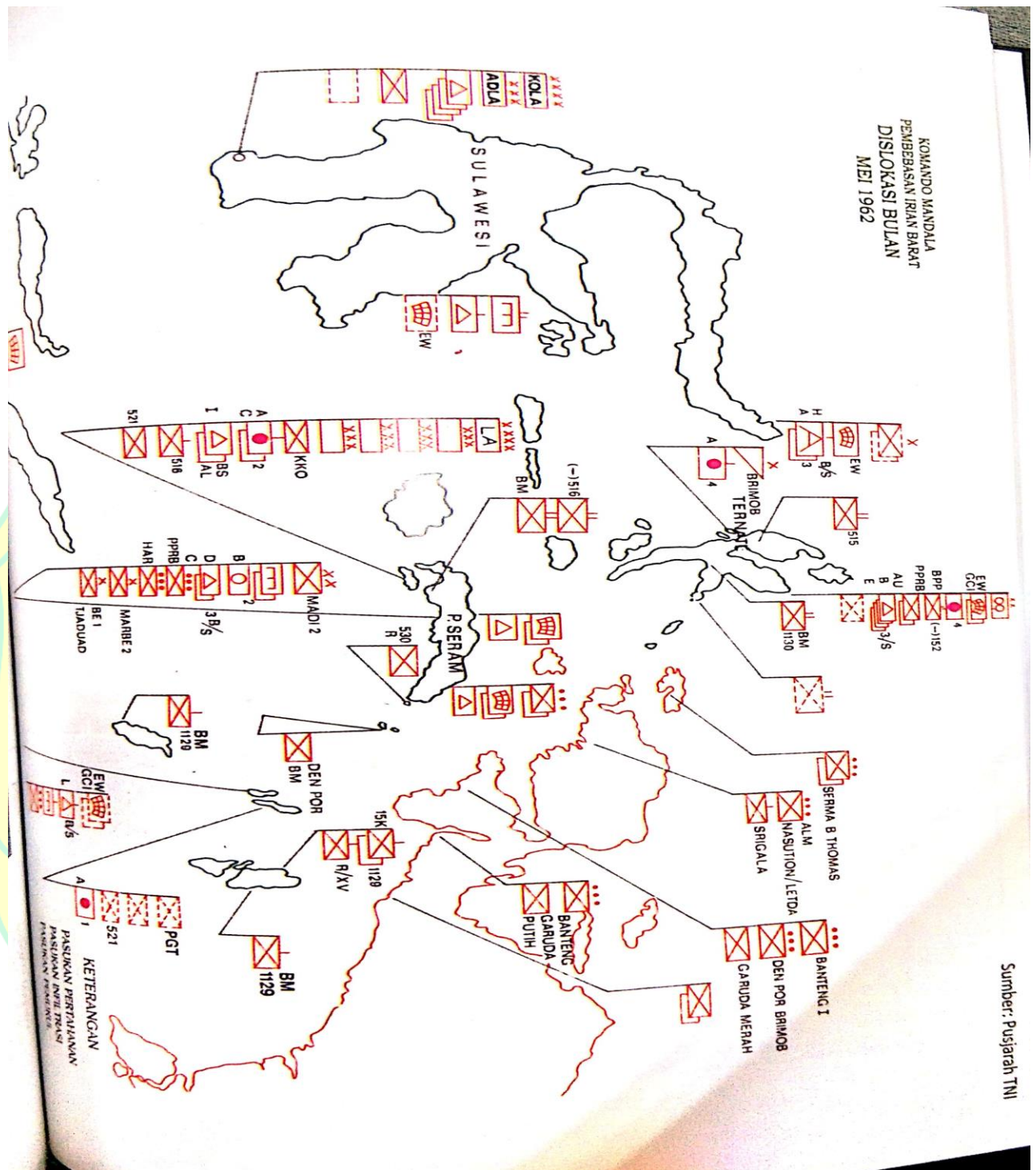
Sumber: Mayor Jenderal Soeharto Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, hlm. 166

Lampiran 14 Peta Basis-Basis AD, AL, AU



Sumber: Mayor Jenderal Soeharto Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, hlm. 142

Lampiran 15 Peta Dislokasi Komando Mandala Pda Bulan Mei 1962



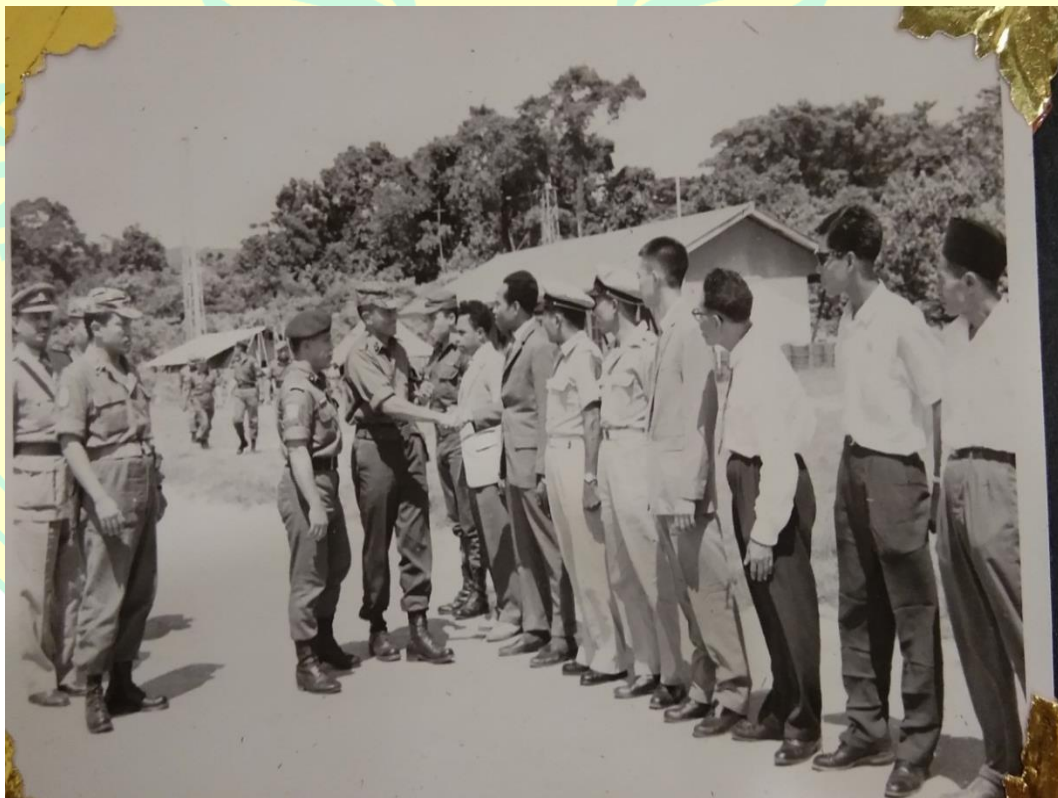
Sumber: Pusjaran TNI

Sumber: Mayor Jenderal Soeharto Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, hlm. 90

Lampiran 16 Penyerahan Penyelenggaraan Pemerintahan Dari UNTEA Kepada Republik Indonesia Ahmad Yani Staf Koti Pembebasan Irian Barat, Tahun 1963







Sumber: Perpustakaan Nasional RI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rahel Agatha, biasa dipanggil Rahel merupakan anak pertama dari Hesekiel Napitupulu dan Lely Margaretha. Mempunyai satu adik perempuan yang bernama Alin Linsay. Lahir pada 11 Juli 1997. Bertempat tinggal di Mampang Prapatan XIII, RT 005/03. No. 15A. Tegal Parang, Jakarta Selatan.

Penulis pernah mengenyam pendidikan di SDN Kebagusan 02 lulus tahun 2009, SMPN 175 Jakarta lulus tahun 2012 dan SMA KARTIKA VIII-1 lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta Prodi Pendidikan Sejarah pada tahun 2015. Selama kuliah penulis aktif mengikuti organisasi BEMP Pendidikan Sejarah 2017-2018 dan Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta (PMK UNJ).

More info hubungi: agatharahel6@gmail.com